

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam fenomena pengembangan nuklir, selain negara-negara anggota dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, Inggris harus mengalami suatu proses yang cukup panjang untuk memastikan bahwa pengembangan nuklir tersebut benar digunakan sebagai tujuan damai bukan sebagai sebuah senjata. Hal ini terjadi pada Republik Islam Iran yang mana ingin merealisasikan pengembangan nuklirnya yang bertujuan damai. Namun dalam pengembangan nuklirnya Iran dikecam oleh beberapa pihak, salah satunya yang paling menentang yaitu Amerika Serikat (AS). AS beranggapan bahwa pengembangan nuklir Iran saat ini tidak digunakan sebagai tujuan damai, melainkan sebagai senjata yang akan mengganggu stabilitas keamanan baik dikawasan maupun global.

Bagi negara Iran teknologi nuklir yang di kembangkannya saat ini bersifat damai dan di gunakan sebagai kepentingan sipil, seperti pembangkit listrik, penerapan di dunia pertanian, medis, dan penyediaan energy listrik. Hanya saja pengembangan nuklir saat ini juga mudah di konversi menjadi senjata sebagai bom peledak seperti yang telah dimiliki oleh berbagai bangsa lain di dunia. Kendatipun negara-negara barat seperti AS telah mempolitisasi isu nuklir Iran (Amirudin, 2014 : 93). Argument Iran mengenai pengembangan nuklir damainya dianggap sebagai retorika belaka oleh beberapa negara barat terutama AS. Perbedaan pendapat ini akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang panjang dalam hubungan diplomatiknya, dimana Iran tetap pada prinsipnya bahwa pengembangan nuklirnya akan digunakan sebagai kepentingan sipil dan tujuan damai. Sementara AS berpendapat bahwa pengembangan nuklir Iran tersebut adalah sebuah senjata. Sehingga membuat beberapa negara lainnya yang tergabung dalam DK PBB ditambah dengan Jerman yang melihat hal ini ikut andil menyelesaikan polemik tersebut guna memastikan status program nuklir Iran,

yang mana negara-negara ini disebut dengan Permanent Five Plus One (P5+1) yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia dan Jerman.

Negara-negara yang telah tergabung dalam kelompok P5+1 ini menginginkan sebuah perundingan damai dengan Iran untuk membahas pengembangan nuklir yang sedang dijalankannya. Pada 10 Januari 2006 Iran merespon hal tersebut untuk memenuhi permintaan dalam melakukan perundingan (El-Gogary, 2007 : 94). Akan tetapi dalam perundingan tersebut nampaknya tidak bisa berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan sikap dari negara-negara anggota P5+1 ini dianggap oleh Iran tidak memberikan solusi seperti yang diharapkan mengenai pengembangan nuklirnya, yang mana justru memberikan tekanan terhadap Iran untuk menghentikan pengembangan nuklirnya dan memberikan sanksi-sanksi berupa embargo ekonomi melalui DK PBB.

Merasa tidak mendapat keadilan dalam perundingannya dengan negara-negara anggota P5+1. Iran dibawah naungan presiden Ahmadinejad merespon hal tersebut dengan mengabaikan segala bentuk tekanan terhadap pengembangan nuklirnya. Tekanan dan pemberian sanksi-sanksi dianggap tidak bernilai sedikitpun bagi negara Iran, justru Ahmadinejad mengancam akan menghentikan perundingan selanjutnya dengan enam negara besar yaitu, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan Jerman (P5+1), jika tidak adanya keadilan dan sanksi-sanksi yang terus diterapkan kepada Iran (Akbar. Kodimerinda, 2012 : 3). Ahmadinejad juga menyebutkan bahwa yang ditakutkan oleh dunia barat seperti AS bukanlah kemampuan Iran memproduksi bom nuklir, mengingat di dunia saat ini bom semacam itu tidak ada gunanya. Melainkan yang mereka khawatirkan ialah kemandirian dan pengetahuan serta kemajuan pemuda Iran di bidang nuklir (Hikmah, 2006 : 186).

Dalam pemerintahan Ahmadinejad sebenarnya Iran cukup menanti keadilan dalam penyelesaian sengketa nuklirnya, serta selalu melakukan pendekatan pada negara-negara anggota DK PBB dan Iran selalu bersedia melakukan perundingan secara damai dengan negara-negara anggota P5+1. Hanya saja pihak anggota P5+1 seperti AS dan sekutunya Inggris, Prancis, Jerman selalu menekan penghentian keseluruhan hak Iran serta pemberian sanksi-sanksi melalui DK PBB hingga tidak adanya titik temu di antara kedua belah pihak. Ahmadinejad juga

menegaskan perlunya menjalin kerjasama dalam bidang nuklir dengan Uni Eropa dan mengingatkan pentingnya sikap saling percaya, bahwasannya Iran membutuhkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energy dan untuk tujuan medis dan ilmiah. Jadi hendaknya negara lain menghormati hak Iran dalam mengembangkan teknologi nuklirnya untuk tujuan-tujuan damai (El-Gogary, 2007 : 57).

Hingga akhir masa jabatan Ahmadinejad selama dua periode perundingan mengenai pengembangan nuklir Iran belum mencapai kesepakatan dengan negara-negara anggota P5+1. Hal tersebut berdasarkan tidak adanya titik temu dan solusi dalam bernegosiasi di antara kedua belah pihak. Atas dasar tersebut sering kali Iran mendapatkan sanksi-sanksi dan berujung ketegangan dengan negara-negara penentang. Hal ini yang membuat Iran selalu menolak kembali untuk menyertai sidang majelis umum PBB, yang dinilai perundingan tersebut hanya untuk ambisi negara penentang menghentikan hak pengembangan nuklir Iran melalui DK PBB bukan menuju dalam penyelesaian konflik. Sebenarnya pembicaraan akan berhasil jika pihak penentang seperti AS dan Uni Eropa bagian dari anggota P5+1 yang ikut dalam penyelesaian nuklir Iran adil dan mengerti akan hak Iran dalam pengembangan nuklir damainya. Jika melihat hal tersebut bisa disimpulkan bahwa ketersediaan energy yang diperuntukan negara Iran adalah suatu kemajuan baru yang di buat sebagai alternative energy dimasa yang akan datang untuk kepentingan nasionalnya bukan diperuntukan dalam pembuatan senjata. Namun, sebelum adanya suatu proses dan kesepakatan yang sah. Negara-negara anggota P5+1 tidak bisa percaya begitu saja dengan argument Iran terhadap pengembangan nuklirnya. Atas dasar keamanan dan perdamaian dunia negara-negara anggota P5+1 akan terus membawa isu nuklir yang berada di Iran ke DK PBB hingga dunia internasional merasa aman dengan aktifitas pengembangan nuklir di Iran.

Melihat fenomena tersebut sulit membayangkan akan tercapainya kompromi antara Iran dengan negara-negara anggota P5+1 dalam perundingannya terkait dengan nuklir Iran. Hal ini dikarenakan di dalam keanggotaan P5+1 ini sendiri tidak bisa menjadi satu suara untuk menyelesaikan isu pengembangan nuklir di Iran, terutama AS dan sekutu eropanya yaitu Inggris,

Prancis, dan Jerman tidak sejalan dengan langkah Cina dan Rusia yang tidak menekan Iran dalam pemberian sanksi namun lebih kepada kompromi. Maka dari itu perjuangan Iran dalam berdiplomasi terkait pengembangan nuklirnya dengan negara-negara anggota P5+1 belum bisa dapat terselesaikan dalam waktu dekat, atau mungkin semakin bereskalasi ketahanan yang lebih berbahaya yakni kemungkinan terjadinya perang apabila tidak ada ruang lagi dalam penyelesaian secara diplomatik (Parasiliti, 2009 : 10).

Pada tahun 2013, di tengah-tengah harapan masalah pengembangan nuklir Iran dapat terselesaikan terjadinya perubahan pemerintahan di Iran. Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden baru menggantikan Ahmadinejad setelah dua periode berkuasa. Iran di bawah pemimpin barunya tetap berupaya untuk mencari keadilan dan solusi terhadap pengembangan nuklirnya dengan melanjutkan perundingan kepada negara-negara anggota P5+1 (Litwak, 2014 : 2). Dengan keyakinan yang kuat Iran akan kembali mengumumkan bahwa mereka bersedia memperpanjang negosiasinya dengan negara-negara anggota P5+1. Kini Iran bersiap kembali menghadapi serangkaian negosiasi yang melelahkan mengingat masalahnya yang cukup sulit dalam berkompromi dengan pihak P5+1. Namun, pemimpin baru Iran ini menyatakan akan tetap optimis bahwa sebuah kesepakatan akan dicapainya. Hal ini tentunya memberikan nuansa baru sekaligus mematahkan pandangan lama terhadap dunia mengenai diplomasi Iran saat ini, dimana Iran mulai melakukan berbagai perubahan termasuk di dalamnya perubahan interaksi terhadap masyarakat internasional terkait pengembangan nuklirnya yang belum terpecahkan. Presiden baru di Iran saat ini nampaknya telah memberikan harapan bagi masyarakat dunia bahwa Iran akan mengejar kebijakan luar negeri liberal atau moderat dan juga dapat menyelesaikan masalah nuklir tersebut yang selama ini belum terpecahkan.

Langkah Iran untuk kembali memperjuangkan perundingannya dengan negara-negara anggota P5+1 nampaknya di respon oleh pihak-pihak anggota P5+1. Upaya Iran membuat suatu kesepakatan dengan negara-negara anggota P5+1 ternyata mulai menjadi perhatian masyarakat internasional kembali. Negara-negara penentang yang tergabung dalam kelompok P5+1 telah memberikan ruang guna mencari solusi bersama dengan Iran untuk mengadakan perundingan kembali

terkait dengan isu nuklir yang selama ini tidak terselesaikan. Kedua belah pihak akhirnya menyetujui untuk sama-sama melaksanakan komitmen mereka masing-masing melakukan perundingan lebih lanjut demi tercapainya sebuah kesepakatan bersama.

I.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari dinamika perjuangan pemerintah Iran dalam berdiplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak penentang terkait pengembangan nuklirnya. Serta adanya tuduhan dan desakan yang dilakukan oleh negara-negara penentang, sampai pada titik dimana Iran berhasil melanjutkan perjuangannya dalam berdiplomasi menghadapi negara-negara anggota P5+1 guna menyelesaikan masalah terkait pengembangan nuklirnya. Berkat diplomasi yang terus dilakukan oleh Iran, kini telah sampai dalam perundingan dengan negara-negara anggota P5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Perancis, Rusia dan Jerman. Peneliti disini tertarik untuk melihat proses diplomasi yang dilakukan Iran terhadap negara-negara anggota P5+1 yang mana selama ini kedua belah pihak tidak menemukan solusi dalam berdiplomasi. Kini kedua belah pihak bersedia untuk kembali merundingkan bersama menyelesaikan masalah isu nuklir yang tidak kunjung usai. Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan untuk membuat sebuah pertanyaan penelitian **“Bagaimana diplomasi Republik Islam Iran kepada negara-negara anggota P5+1 dalam perundingan nuklir Iran periode (2013-2015)?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui dinamika pengembangan nuklir di Iran.
- b. Memahami pelaksanaan diplomasi yang sedang dilakukan oleh Iran.
- c. Menganalisa upaya suatu negara yaitu Republik Islam Iran dalam melakukan diplomasi demi terwujudnya suatu penyelesaian masalah terkait pengembangan nuklirnya.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah memberikan informasi dan data didalam jurusan ilmu hubungan Internasional terutama konsentrasi pengkajian strategis mengenai diplomasi.
- b. Secara praktis dapat membantu memahami penerapan diplomasi yang dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara penentang yaitu negara-negara anggota P5+1.

I.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap karya akademis atau penelitian yang memiliki kemiripan, atau yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain :

Dalam tulisan buku yang berjudul “Ahmadinejad The Nuclear Saviour Of Tehran” karya Adel El Gogary. Adel El Gogary mengutip pembangunan Nuklir yang ada di Iran dan sejarah yang melatar belakangi adanya nuklir di Iran, serta perbedaan pemerintahan yang terjadi antara sebelum Revolusi yang dipimpin Shah Reza Pahlevi dan sesudah Revolusi yang dipimpin Ayatullah Khomeini. Munculnya kepemimpinan baru di Iran yaitu Ahmadinejad menumbuhkan satu semangat baru di negara Iran dan kembali menjalankan pengembangan nuklir damainya tanpa takut akan tekanan terhadap kaum Zionis. Dengan latar belakang dan performa kepribadian Ahmadinejad yang tegas, serta jalan yang mengantarkannya ke kursi kepresidenan tentu mengarah atau cenderung melakukan pilihan-pilihan yang konfrontatif. Akan tetapi pilihan radikal yang di ambilnya ini akan berubah jika tidak di dukung oleh sumber daya energy dan legitimasi penunjang dari Teheran. Bisa jadi kalkulasi politik Iran dalam pengembangan nuklirnya akan berubah atau setidaknya pihak penentang tidak akan ragu secara tegas menggunakan kekuatan militernya seperti Amerika Serikat untuk menghentikan langkah Ahmadinejad dengan segala pernyataan-pernyataannya yang kontroversial (El-Gogary, 2007 : 89).

Berikut ini merupakan tulisan-tulisan ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang menggambarkan diplomasi terkait dengan pengembangan nuklir di Iran. Tujuan dari diplomasi tersebut agar dunia internasional menerima dan

mengetahui bahwa pengembangan nuklir yang sedang dilakukan Iran diperuntukan sebagai tujuan damai. Yang pertama artikel jurnal yang berjudul *“Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi Kepada IAEA”* Iran sebagai negara di Timur Tengah telah mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Namun, adanya pihak penentang yang menolak pengembangan nuklir tersebut membuat Iran melakukan suatu upaya kerjasama terhadap organisasi Internasional yaitu IAEA guna meyakinkan pihak penentang bahwa tidak adanya indikasi pembuatan senjata nuklir di Iran. Dalam menjalankan kerjasamanya kepada IAEA Iran selalu memberikan akses penuh terhadap pemeriksaan instalasi nuklirnya. Termasuk memberikan semua laporan yang dibutuhkan dan penerapan pengembangan nuklir Iran dengan segala kekhususannya yang memang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Dalam berbagai pemeriksaan, kunjungan dan dialog, IAEA sendiri mengakui hal ini tidak adanya indikasi pembuatan senjata nuklir. Namun, pengembangan nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA tidak cukup membuat Iran terhindar dari tekanan dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB. Hal itu dikarenakan adanya otoritas negara yang menekan organisasi internasional seperti IAEA, yang akhirnya tidak berjalan efektif dalam mengurus masalah pengembangan nuklir di Iran (Akbar. Kodimerinda, 2012 : 15).

Kedua, artikel jurnal yang berjudul *“Perubahan Kebijakan Nuklir Iran Di Era Pemerintahan Hassan Rouhani”* mengungkapkan hadirnya Hassan Rouhani sebagai presiden baru di Iran mencoba untuk melakukan perubahan kebijakan nuklir di Iran. Menurut Rohani merubah kebijakannya mengenai pengembangan nuklir Iran adalah langkah tepat untuk menyelesaikan masalah pengembangan nuklir Iran saat ini. Kebijakan nuklir Iran sebelumnya menurutnya mengakibatkan pengembangan nuklir Iran semakin memburuk dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Iran atas sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB. Maka dari itu Rohani mencoba memperbaiki kebijakan nuklir yang berada di Iran, yang diharapkan akan membawa dampak positif dan melunakan sanksi-sanksi demi membangun kembali perekonomian Iran (Rizky, 2013 : 13).

Dari ketiga tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun ketiga

tinjauan pustaka ini akan menjadi acuan atau bahan pendukung untuk menganalisa penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari buku yang ditulis oleh Adel El Gogary melitinkan awal mula pengembangan nuklir Iran dipermasalahan dan alasan mengapa Iran tetap melakukan pengembangan nuklirnya. Sementara, pada tinjauan pustaka artikel jurnal pertama, penulis melihat aktor-aktor yang terlibat seperti IAEA selaku organisasi internasional yang berkewajiban mengontrol pengembangan nuklir yang berada di Iran. Maka dari itu Iran yang sedang melakukan pengembangan nuklirnya mencoba melakukan kerjasama dengan IAEA dengan harapan bisa meyakinkan pihak penentang. Sedangkan pada tinjauan pustaka yang ketiga, penulis melihat perubahan dimensi politik didalam system kebijakan luar negeri Iran, hadirnya pemimpin baru Iran membuat suatu pandangan yang berbeda dalam membuat kebijakan terhadap pengembangan nuklir di Iran dari pemerintahan sebelumnya, dengan harapan adanya respon yang positif dari negara-negara penentang untuk melunakan sanksi-sanksi yang selama ini di terapkan dan mengganggu perekonomian Iran. Sehingga arah selanjutnya akan membahas lebih dalam mengenai langkah diplomasi Republik Islam Iran kepada negara-negara penentang yaitu anggota P5+1 dalam merundingkan masalah pengembangan nuklir Iran. Penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam sampai akhirnya diplomasi Iran menemukan titik terang dan kesepakatan bersama dengan negara-negara anggota P5+1.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk membahas permasalahan mengenai diplomasi Republik Islam Iran kepada negara-negara anggota p5+1 dalam perundingan nuklir Iran. Maka digunakan teori kebijakan luar negeri dan teori diplomasi untuk melihat hasil dari kedua belah pihak.

1.6.1 Kebijakan Luar Negeri

Dalam hubungan Internasional kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang di buat oleh para pembuat keputusan negara dalam berinteraksi menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya. Terkait dengan kebijakan luar negeri, Reynold mendefinisikannya sebagai sejumlah tindakan yang diambil oleh pemerintah sebuah negara dalam menjalin

hubungan dengan negara lain yang di kendalikan dalam tingkat internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Reynold, 1971 : 63). Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat dalam naungannya yang mana menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dirancang dalam bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan. Tindakan dapat juga sebagai isyarat yang dikirimkan oleh seorang actor untuk mempengaruhi pandangan si penerima mengenai si pengirim. Dalam politik internasional, tindakan dan isyarat mengambil banyak bentuk yang berlainan janji akan memberikan bantuan luar negeri adalah satu tindakan. Seperti halnya seruan propaganda, peragaan kekuatan militer, penggunaan hak veto didewan keamanan, angkat kaki dari konferensi, pengorganisasian konferensi, pemberian peringatan dalam nota diplomatik, pemberian uang dan senjata kepada gerakan pembebasan, pemboikotan atas barang negara lain atau pernyataan perang (Holsti, 1988 : 159).

Kebijakan luar negeri memang sangat di butuhkan oleh sebuah negara dalam perjalanannya. Karena suatu negara tentu akan berinteraksi dengan negara lainnya, sehingga perlu memiliki pedoman dasar berupa tindakan yang nantinya mampu mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak hubungan diplomatik dengan negara lain. Dalam penetapan sebuah kebijakan luar negeri, pemerintah suatu negara juga harus memperhatikan perubahan yang terjadi dilingkungan domestik maupun di lingkungan internasional. Holsti menyebutkan 3 faktor yang menentukan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu :

- a. Faktor pembuat kebijakan luar negeri, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan, kepribadian serta kepentingan politik dari mereka yang bertanggung jawab dalam menentukan langkah-langkah apa saja yang harus di ambil untuk mencapai sasaran.
- b. Faktor internasional dan struktur system internasional, nilai-nilai yang dianut secara internasional seperti menentukan hak sendiri dan kebebasan politik. Memahami situasi dan peristiwa diluar negeri seperti pecahnya perang atau runtuhnya pemerintahan di negara lain.

- c. Faktor domestic, dalam hal ini terdapat dua jenis kebutuhan domestic yang pertama kepentingan kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri seperti kepentingan partai politik dan kepentingan organisasi. Kedua kebutuhan sosial ekonomi yang timbul karna keadaan geografis, demografi dan persediaan sumberdaya alam negara yang bersangkutan.

Dengan melihat pengertian kebijakan luar negeri di atas maka peneliti simpulkan kedalam isu yang peneliti angkat bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Iran adalah hasil dari tindakan seorang pemimpin di Iran sendiri untuk memecahkan masalah dan mempromosikan suatu tindakannya khususnya dalam pengembangan nuklir di Iran. Yang mana selama ini pengembangan nuklir di Iran selalu di tentang oleh banyak pihak. Maka tindakan pemerintah Iran ini dilakukan untuk mempengaruhi sikap dari negara-negara lain agar merespon kebijakan yang dirancang oleh presiden Iran dengan harapan mendapat dukungan penuh dalam pengembangan nuklirnya, sehingga akan tercapainya sebuah kepentingan nasional yang diinginkannya.

1.6.2 Diplomasi

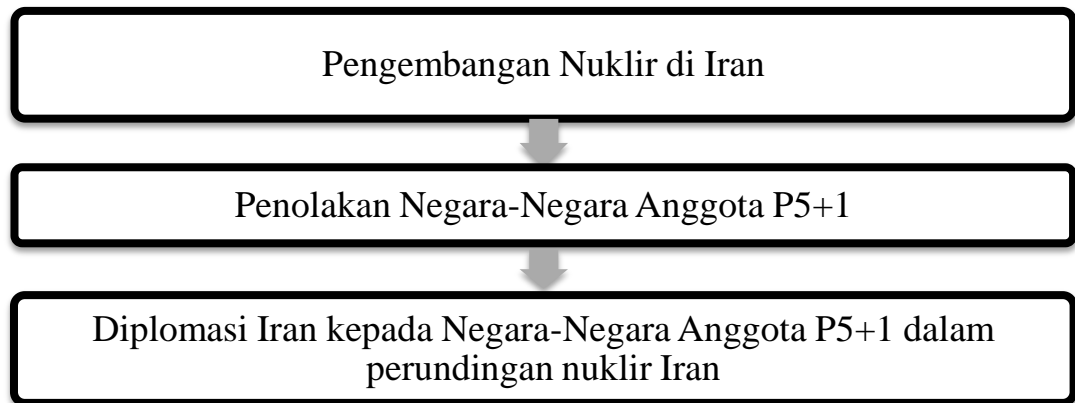
Dalam ranah hubungan internasional cara yang paling tepat untuk menuju penyelesaian konflik adalah diplomasi, hal ini dianggap menjadi bagian penting dalam politik internasional sebuah negara. Diplomasi berkaitan erat dengan hubungan antar negara yang mana menurut Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan mendefinisikan diplomasi sebagai "*proses keseluruhan yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melaksanakan hubungan internasional*" (Griffiths. Terry, 2002 : 79). Dalam hal tertentu biasanya pengertian diplomasi bisa disamakan dengan politik internasional akan tetapi secara spesifik dapat dibedakan dimana diplomasi berkaitan dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut maksud dan tujuan dari apa yang telah terumuskan dalam sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri sendiri menyangkut substansi dan isi-isi dari hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi mengenai masalah metodologi untuk melaksanakan politik luar negeri. Menurut Martin Griffiths, diplomasi memiliki tiga fungsi utama yaitu *intelligence gathering*, *image management*, dan *policy implementation*. Ketiga

fungsi ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan citra yang menguntungkan bagi suatu negara.

Sedangkan menurut G.R Berridge di dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy Theory and Practice*, mengartikan diplomasi yaitu sebuah dasar kegiatan politik baik sumber daya dan kemampuan keterampilan, dan sebagai bahan utama dari kekuasaan. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan suatu negara dalam mengamankan kebijakan luar negeri negara tanpa memaksa dengan menggunakan kekuatan, propaganda atau bantuan hukum. Dengan hal tersebut diplomasi yang dimaksud lebih mengedepankan komunikasi dengan cara negosiasi untuk mempromosikan kebijakan luar negeri suatu negara baik melalui perjanjian formal atau non formal (Berridge, 2002:1).

Dengan melihat kedua pengertian diplomasi diatas dapat disimpulkan bahwa diplomasi merupakan alat suatu negara untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan negara lain baik dalam menyelesaikan konflik maupun untuk mengamankan kebijakan suatu negara dengan cara negosiasi. Serta keseluruhan tindakan yang berhubungan dengan interaksi Internasional tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, dan badan hukum. Dalam hal ini seperti Isu yang peneliti angkat telah menjelaskan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara penentang yaitu P5+1 adalah suatu tindakan untuk melakukan penyelesaian kasus sengketa nuklirnya yang selama ini tidak menemukan titik terang. Maka dari itu Iran melakukan cara dengan mengedepankan komunikasi, negosiasi yang nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan bersama antara pihak penentang dan Iran untuk menciptakan citra yang menguntungkan satu sama lain.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Dalam melakukan penelitian ini penulis menarik beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

- a. Kebijakan Iran untuk terus meningkatkan pengembangan nuklir untuk tujuan damai semakin tinggi. Hal tersebut dilakukan Iran sebagai jalan alternative di bidang energi untuk masa yang akan datang. Namun hal ini justru memunculkan aktor-aktor penentang untuk melakukan penolakan yang cukup menekan bagi Iran dalam pengembangan nuklir damai.
- b. Penolakan negara-negara penentang terhadap pengembangan nuklir Iran berdampak terhambatnya kemajuan Iran di bidang energi dan menjadi permasalahan yang harus di selesaikan oleh Iran.
- c. Masalah pengembangan nuklir Iran perlu di atasi dengan adanya penolakan tersebut, maka langkah diplomasi yang di anggap tepat untuk menyelesaikannya.

I.9 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Densin dan Lincoln, kata kualitatif merupakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Para peneliti kualitatif menstudi segala sesuatu

dalam latar alamiahnya, berusaha untuk memahami atau menginterpretasi fenomena dalam hal makna-makna yang orang-orang berikan pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan beragam material empiris yang digunakan seperti studi kasus, pengalaman personal, introspektif, kisah hidup, teks wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematik serta makna dalam kehidupan individual (Ahmadi, 2014 : 15). Dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti melakukan upaya untuk mengkaji kasus dengan penggunaan dan pengumpulan data secara empiris melalui pengamatan di lapangan kemudian di analisis dan juga dihubungkan dengan teori yang digunakan. Dalam skripsi ini, peneliti berusaha untuk melakukan analisis terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai Kebijakan Cina dalam meningkatkan kerjasama energi dengan dengan menghubungkan teori yang ada dan relevan.

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif ini dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif kualitatif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter (Suyanto. sutinah, 2006 : 186). Penulis berupaya memberikan deskripsi mengenai diplomasi Republik Islam Iran terhadap negara-negara anggota P5+1 dalam perundingan nuklir Iran.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder yang dapat mendukung pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian serta secara keilmuan dapat dibuktikan. Data primer yang digunakan adalah pernyataan resmi dari pemerintah seperti buku putih, kutipan pernyataan dari lembaga pemerintah. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi hubungan internasional, majalah, surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

I.9.3 Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data menurut Neuman merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan. Sekali suatu pola itu diidentifikasi, pola itu diinterpretasi ke dalam istilah-istilah teori sosial atau latar di mana teori sosial itu terjadi. Peneliti kualitatif pindah dari deskripsi peristiwa historis atau latar sosial ke interpretasi maknanya lebih umum. Analisis data mencakup menguji, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensistesisikan, dan merenungkan data yang direkam juga meninjau kembali data mentah dan terekam (Ahmadi, 2014 : 230). Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan menganalisis data yang ada secara deskriptif serta data yang ada di lakukan identifikasi yang kemudian diinterpretasikan secara sistematis dan rinci. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa secara deskriptif diplomasi Republik Islam Iran kepada Negara-Negara anggota P5+1 dalam perundingan pengembangan nuklir Iran dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah di pilih yaitu, teori kebijakan luar negeri dan teori diplomasi serta untuk menjelaskan data yang diperoleh.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 Bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan berisikan sub-bab latar belakang mengenai terjadinya permasalahan, sub-bab latar belakang ini juga berisi permasalahan pokok, tujuan, serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, serta alur pemikiran. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II : DINAMIKA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR IRAN

Bab kedua penulis secara umum akan menjelaskan dinamika pengembangan nuklir di Iran dengan adanya keterlibatan negara-negara *Super*

Power dalam pengembangan nuklirnya. Sampai munculnya sebuah perubahan arah menjadi penolakan dari negara-negara *Super Power* yang kini di sebut sebagai anggota P5+1 (Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia dan Jerman). Maka jalur diplomasi seringkali dilakukan kedua belah pihak.

BAB III : DIPLOMASI IRAN TERHADAP NEGARA-NEGARA P5+1

Bab ketiga ini akan membahas mengenai upaya diplomasi Iran yang terus dilakukan dalam mengatasi permasalahan isu nuklir demi tercapainya sebuah kesepakatan antara Iran dengan negara-negara anggota P5+1 dalam merundingkan masalah pengembangan nuklir Iran, serta hambatan Iran dalam melakukan diplomasi kepada negara-negara anggota P5+1.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab keempat ini merupakan bagian penutup dari hasil penelitian penulis. Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang di peroleh penulis pada bab II dan bab III.

